



**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 81 /SK-SEKRET/DPRD/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
190/SK.SEKRET/DPRD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 190/SK.SEKRET/DPRD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 00051/23400/AZ/10/24 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 10 Oktober 2024, pegawai atas nama Indah Lestari, S.I.P.,M.M., yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025 telah memasuki masa purna tugas terhitung mulai tanggal 1 April 2025 sehingga diperlukan perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

190/SK.SEKRET/DPRD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) tentang Perubahan Atas Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 113) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 95/K/DPRD/2024 - 15/PERS.BER/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 190/SK.SEKRET/DPRD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Mengubah ~~lampiran~~ Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 190/SK.SEKRET/DPRD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS,

YUDI ISMONO

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Bappeda DIY
4. Kepala BPKA DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. PPTK yang bersangkutan;
7. Arsip.

Nama Jabatan	Paraf
Kepala Bagian Penyusunan Produk Hukum dan Pengkajian	
Plh. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 81 /SK.SEKRET / DPRD / 2025
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
190/SK.SEKRET/DPRD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

No	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB TEKNIS	KODE REKENING DAN NAMA SUB KEGIATAN
1	ANASTASIA EKA SUSANTI, S.H. NIP.196902241998032004	1) 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2) 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
2	LIA KUSUMA HANDAYANI, S.H., M.Hum. NIP.198003142006052001	1) 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 2) 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
3	RIO KAMAL SYIEFA, S.H., M.AP., M.SC. NIP.198010112005011010	1) 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda 2) 4.02.02.1.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 3) 4.02.02.1.04.0003 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4	TRI SUYUTIYANTO, S.Pd. NIP.197001021992031006	1) 4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD 2) 4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 3) 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS 4) 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 5) 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD 6) 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD 7) 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 8) 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

No	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB TEKNIS	KODE REKENING DAN NAMA SUB KEGIATAN
		9) 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD
5	LUSI ANTARI, S.IP.,M.M. NIP. 196709191990092002	1) 4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester 2) 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 3) 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 4) 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 5) 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 6) 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD
6	MARLINA HANDAYANI , S.Pd., MM NIP. 196805251998032006	1) 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 2) 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
7	SISWANTO, S.S.T., M.M. NIP. 197505232007011008	1) 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
8	KAWIT WIDADA NIP. 197001181991031007	1) 4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
9	FUADI, S.E. NIP. 197505101998031009	1) 4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
10	UJI GIGIH FIRMANSAH, S.I.Kom NIP. 199708142020121005	1) 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses
11	GALUH MAHANANI, S.H., M.Ec.Dev. NIP.198806212011012012	1) 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3) 4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4) 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5) 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

No	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB TEKNIS	KODE REKENING DAN NAMA SUB KEGIATAN
12	HERI LEGOWO, S.S., M.Ec.Dev. NIP.197505041998031004	1) 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) 4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3) 4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4) 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
13	JOKO SUSILO, SE NIP.197103121994031002	1) 4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2) 4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3) 4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4) 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5) 4.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 6) 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7) 4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8) 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
14	SITI YULIASTUTI, S.IP., M.M. NIP.197307141993032005	1) 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2) 4.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3) 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD 4) 4.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5) 4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB TEKNIS	KODE REKENING DAN NAMA SUB KEGIATAN
15	FITRIANA WAHYU DEWAYANI, S.IP. NIP. 199004262015022002	1) 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4) 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5) 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

SEKRETARIS,

YUDI ISMONO

Nama Jabatan	Paraf
Kepala Bagian Penyusunan Produk Hukum dan Pengkajian	Ck
Plh. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	h